

## Siap Pertahankan WTP, Bupati BS Minta Dukungan DPRD



Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi mengatakan bahwa dirinya siap untuk mempertahankan raihan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI tahun 2021. Hal ini disampaikan Bupati Gusnan dihadapan para anggota dewan dan para unsur muspida dalam rapat Paripurna dewan tentang tindaklanjut LHP BPK-RI perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap pemerintah daerah BS tahun 2021, Selasa (12/07). Dalam pidatonya, Bupati BS Gusnan Mulyadi mengaku siap akan melaksanakan rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan yang disampaikan juru bicara dewan yakni Supardi. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, opini predikat wajar tanpa pengecualian itu bukanlah sebuah prestasi, namun semua kalangan jajaran ke pemerintahan Bengkulu Selatan harus tetap bersyukur atas predikat yang diraih. “Sesuai amanat bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, bahwa kita harus terus melakukan kerja keras untuk mempertahankan raihan opini WTP ini,” ucap Gusnan Mulyadi. Ini merupakan sebagai bukti bahwa pihak Eksekutif dan Legislatif telah menjalankan roda pemerintahan di jalan yang baik dan benar. Mari kita pertahankan bersama, semoga di tahun yang akan datang Bengkulu Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian, kata Bupati. Menanggapi 4 temuan BPK yang direkomendasikan Dewan, Gusnan Mulyadi mengaku bahwa dari pihak Eksekutif (Pemerintah Bengkulu Selatan) sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan seluruh OPD. Dalam pertemuan dengan seluruh OPD tersebut, Bupati melaporkan pada rapat paripurna itu, bahwa pihaknya telah membahas beberapa hasil temuan BPK. “Dari penelisikan kami, temuan BPK terhadap honor-honor, kami meyakini adalah hal yang benar. Ada beberapa item yang harus dikoreksi, dan kami memerintahkan kepada TAPD dan mohon dukungan dari DPRD untuk mengamati cots and Cutting anggaran pada beberapa OPD yang dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih anggaran biaya,” harap Bupati. Sebagai evaluasi, Gusnan berjanji kedepannya akan mengamati dengan benar rancangan APBD Bengkulu Selatan. “Kepada Anggota Banggar (Badan anggaran) DPRD Bengkulu Selatan mohon kerjasamanya tercapai indikator yang dikehendaki,” demikian Bupati Bengkulu Selatan Gusnan mulyadi.

## Sumber Berita

1. <https://www.rmolbengkulu.id/siap-pertahankan-wtp-bupati-bs-minta-dukungan-dprd>
2. <https://www.koranpublikasi.com/28975-2/>
3. <https://rdnewsbengkulu.com/2022/07/13/bupati-siap-laksanakan-rekomendasi-dprd-bs-terkait-lhp-bpk/>

## Catatan Berita

### 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

#### Pasal 1 angka 1

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### Pasal 1 angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

#### Pasal 2 ayat (2)

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### Pasal 16 ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

#### Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

### 2. PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN (PSP) NOMOR : 03.01

#### Poin 6 huruf a

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.